



UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA

**STRATEGI KEAMANAN ENERGI INDONESIA DI WILAYAH
AMBALAT PERIODE 2004 - 2009**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister dalam Ilmu Pertahanan

**DIDIN YULIANTO
NIM. 120120204008**

**FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN
PROGRAM STUDI KETAHANAN ENERGI**

**JAKARTA
DESEMBER 2013**

ABSTRAK

Nama : Didin Yulianto
 Program Studi : Ketahanan Energi
 Judul : Strategi Keamanan Energi Indonesia Di Wilayah
 Ambalat Periode 2004 – 2009

Tesis ini menganalisa tentang langkah keamanan energi Indonesia di wilayah Ambalat dalam bidang ekonomi, politik, dan militer. Penelitian ini dijalankan dengan menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini yang menggunakan logika pemikiran sekuritisasi, strategi, dan keamanan energi. Hasil penelitian ini menggambarkan belum efektifnya langkah keamanan energi yang dilakukan Indonesia sehingga berdampak pada ketersediaan, akses, dan keterjangkauan energi Indonesia. Untuk itu, penelitian ini menyarankan bahwa diperlukan berbagai strategi, baik secara ekonomi, politik, dan militer yang lebih komprehensif.

Kata kunci: Keamanan Energi, Ambalat, Sekuritisasi

ABSTRACT

Name : Didin Yulianto
 Study Program : Energy Security
 Title : The Indonesia's Energy Security Strategy In Ambalat
 Region; Time of Period 2004 - 2009

This research is analyzing the way of Indonesia's effort in energy security field in Ambalat on economic, politic, and military realms. This research is running by using quantitative method which is implemented in analytical descriptive. To do analysis, this research is done by using theoretical framework, namely securitization, strategy, and energy security. The result of this research gives a picture that Indonesia's effort is not really effective in securitizing its energy, especially in Ambalat which finally affects the availability, accessibility, and affordability. So that, this research recommends that Indonesia need to be more serious to do securitization in very comprehensive strategy in economics, politic, and military realms.

Keyword: Energy Security, Ambalat, Securitization

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Logika pergeseran esensi *security* atau keamanan terletak pada perkembangan isu yang awalnya menjadi domain militer saja atau hanya terkait dengan isu-isu tradisional. Paska perang dingin, semakin banyaknya isu berdampak pada agenda keamanan yang juga menghasilkan jenis-jenis ancaman yang berbeda pula.

Isu-isu non tradisional sangat menjadi fokus mengingat terdapat perubahan isu yang kini tidak hanya didominasi oleh bentuk invasi atau perang sesungguhnya. Namun dengan adanya isu-isu non tradisional, negara kini lebih banyak difokuskan pada permasalahan keamanan yang lebih luas dan tidak hanya menyentuh aspek militer saja.

Isu kesehatan (*food security*), imigrasi gelap (*illegal migration*), dan energi (*energy security*) menjadi agenda yang tercakup sebagai bagian dari isu yang berpengaruh besar terhadap keamanan nasional sebuah negara atau isu-isu non tradisional. Proses pengamanan berbagai isu atau bidang yang tidak terkait langsung dengan militeristik merupakan proses sekuritisasi (*securitization*) yang menjadi agenda global. Kondisi ini menghasilkan bentuk keamanan global yang menghasilkan berbagai isu dan proses pengamanan isu tersebut. Dengan kata lain, *security* atau keamanan menjadi sangat politis, karena itu, *security* memainkan peran vital dalam menentukan siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana di dunia politik. (William, 2008: 3)

Agenda keamanan global berjalan pada logika dimana objek yang terancam merupakan objek yang cakupannya tidak hanya mengenai negara dan militer, namun lebih menekankan pada politisasi terhadap isu atau objek yang mendapatkan ancaman sehingga berkonsekuensi pada keamanan nasional sebuah negara. Terlebih pada wilayah yang memiliki batas langsung dengan negara lain, yang berpotensi kemungkinan

hilangnya luas wilayah dan pengaruhnya terhadap kedaulatan negara. Kondisi ini tidak hanya menggambarkan permasalahan kedaulatan saja, namun juga kandungan sumber daya alam yang memiliki peranan penting dalam keamanan nasional, serta penguatan ekonomi dan politik sebuah negara sebagai bagian dari agenda keamanan negara.

Dalam konteks Indonesia, terdapat wilayah yang mengandung kekayaan alam, seperti sumber minyak yang mendapatkan gangguan dalam upaya eksplorasi menghadapi Malaysia, untuk itu Indonesia berupaya melakukan pengamanan melalui pembentukan strategi keamanan energi yang mencakup tiga sektor, yaitu ekonomi, politik, dan militer.

Pengamanan pada keamanan energi dan keamanan atas sumber daya energi yang dilakukan Indonesia sangat terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi Indonesia, yaitu permasalahan Ambalat. Ambalat adalah blok laut luas yang memiliki cakupan wilayah seluas 15.235 kilometer persegi yang berada pada Laut Sulawesi atau Selat Makasar dan berlokasi tidak jauh dari perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia. Wilayah ini memiliki kekayaan laut dan bawah laut, terutama minyak. Menurut ahli geologi dari lembaga konsultan Exploration Think Tank Indonesia (ETTI) Andang Bachtiar, satu titik tambang di Ambalat menyimpan cadangan potensial 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik gas (<http://tempo.co>). Wilayah ini merupakan wilayah yang dipersengketakan oleh dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Wilayah Ambalat memang belum memiliki kejelasan yang pasti mengingat kedua negara mengklaim bahwa wilayah tersebut menjadi bagian dari teritorial masing-masing negara.

Keberadaan energi di wilayah Ambalat menjadi bagian dari upaya Indonesia dalam memproteksi keberadaan energi di wilayah tersebut. Hal itu sejalan dengan logika strategi keamanan energi sebuah negara yang meliputi 4 elemen, salah satunya menekankan pada *availability* atau keberadaan dan kepemilikan sumber energi domestik (Elkind, 2007,

www.brookings.edu). Ketersediaan (*availability*) akan sumber energi menjadi penting dalam memberikan kecukupan atas energi yang dapat disediakan oleh negara terhadap keberlangsungan kegiatan ekonomi bangsa. Dengan meningkatnya penggunaan energi, sudah tentu dibutuhkan pasokan energi yang cukup dan dapat terpenuhi secara terus menerus (*sustainable*). Kondisi ini berjalan pada logika bahwa setiap negara perlu menjaga kepemilikan sumber daya alamnya sehingga terdapat upaya eksplorasi untuk mendukung peningkatan kekuatan negara.

Konsumsi energi Indonesia meningkat secara historikal dengan pertumbuhan rata-rata 3,09% per tahun. Sejalan dengan konsumsi energi yang meningkat, maka penyediaan energi primer maupun final mengikuti kenaikan tersebut. (BPPT, 2012: 2). Dengan adanya peningkatan kebutuhan energi yang dialami Indonesia, sepatutnya diperlukan berbagai kebijakan energi yang mampu menunjang kebutuhan dan penyediaan energi bagi Indonesia.

Terkait dengan keberadaan sumber energi di wilayah Ambalat, Indonesia sepatutnya berkiblat pada hukum internasional yang berlaku. Pada tahun 1982, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa menggelar Konferensi Hukum Laut (UNCLOS). Konferensi tersebut menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagai *archipelago state*, Indonesia memiliki luas wilayah laut yang lebih besar dibandingkan luas wilayah daratan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif, wilayah laut yang menjadi batas luar dari laut teritorial dikenal sebagai Zona Ekonomi Eksklusif. Zona yang dimiliki sebuah negara ini memiliki jangkauan wilayah laut sepanjang 200 mil dari garis pantai. (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif)

ZEE merupakan zona sebuah negara pantai yang memiliki hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi

Ekstusif). Berdasarkan kebijakan tersebut, maka Indonesia bersikukuh atas kepemilikan Ambalat sebagai bagian dari wilayah teritorial Indonesia. Meski begitu, terdapat ketegangan yang mengarah pada terjadinya konflik antara Indonesia-Malaysia, terkait dengan klaim Malaysia bahwa kawasan Ambalat yang berada di Kabupaten Nunukan (<http://kemhan.go.id>). Upaya yang dilakukan Malaysia dengan mengklaim Ambalat merupakan sebuah isu geopolitik yang mesti diwaspadai. Kondisi ini merupakan ancaman yang dihadapi Indonesia sehingga akan berdampak pada keutuhan wilayah dan keberadaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

Upaya Indonesia untuk mempertahankan Ambalat sebagai wilayah teritorial yang menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan suatu strategi dengan mengeluarkan berbagai bentuk kebijakan, diantaranya Undang-Undang No 17 tahun 1985 tentang pengesahan Unclos tahun 1982 telah disesuaikan dengan isi amandemen UUD NKRI tahun 1945. Secara politik, wilayah Ambalat merupakan bagian dari wilayah kesatuan yang masuk sebagai bagian dari Indonesia dan untuk itu, Indonesia telah berupaya mempertahankannya. Di sisi lain, terdapat upaya eksplorasi sumber mineral yang dimiliki oleh Ambalat yang berada pada wilayah Zona Ekonomi Ekstusif Indonesia.

Sebagai wilayah yang menjadi sumber klaim dan konflik, Ambalat merupakan wilayah yang patut menjadi perhatian, baik dari sisi politik, ekonomi, maupun militer. Kecenderungan negara untuk melakukan pengamanan merupakan upaya sekuritisasi terhadap objek yang menjadi sumber konflik. Langkah sekuritisasi merupakan strategi keamanan oleh Indonesia merupakan sebuah sikap yang menggambarkan upaya untuk mempertahankan keberadaan Ambalat sebagai wilayah kedaulatan Indonesia.

Buku putih Pertahanan Indonesia Tahun 2008 menyatakan bahwa "karakteristik geografis Indonesia mengandung tantangan yang multidimensi sehingga menuntut adanya strategi pertahanan negara yang tepat untuk mengamankan wilayah tersebut. Wilayah yang menjadi objek

pengamanan merupakan wilayah-wilayah atau isu perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar". (Buku Putih Pertahanan, 18: 2008)

Dalam berbagai literatur, dijelaskan bahwa nilai strategis sumber daya alam akan mendorong setiap negara dalam melakukan pengamanan terhadap sumber daya tersebut, mulai dari pengamanan jalur atau akses terhadap sumber daya tersebut sampai pada diplomasi politik, serta pengamanan secara militer. (Morgenthau, 1985) Kondisi itu sejalan dengan upaya yang banyak dilakukan oleh negara-negara besar seperti halnya Rusia di Laut Kasipia, Amerika Serikat di Timur Tengah, China di Afrika, serta konflik Amerika Serikat dan China di Laut China Selatan. Langkah pengamanan secara militer menjadi pilihan akhir apabila segala cara diplomasi tidak menemui titik temu yang pasti, atau bahkan cara yang dilakukan menjadi konflik kepentingan yang sangat kuat. Hal itu ditentukan oleh eskalasi konflik yang ditujukan untuk meredam sehingga tetap terdapat upaya mempertahankan wilayah sebagai bagian dari upaya dalam menjaga keutuhan wilayah dan sumber daya alam yang ada.

Melihat upaya-upaya yang sudah dilakukan banyak negara-negara lain dalam mengamankan sumber energi demi keberlangsungan negaranya dalam menjaga keamanan nasionalnya, terlihat bahwa pentingnya upaya sekuritisasi terhadap objek yang memiliki nilai strategis seperti halnya sumber daya alam berupa energi. Sumber daya alam ini sangat mempengaruhi akan keberlangsungan kegiatan ekonomi negara secara berkelanjutan seiring dengan bertambahnya populasi penduduk, sehingga pasokan akan energi akan terus meningkat. Peran sumber energi yang belum dimanfaatkan akan menjadi cadangan strategis yang penting. Pentingnya sumber energi yang dimiliki sebuah negara akan menentukan bagaimana negara tersebut melakukan aktifitas ekonominya dalam menunjang kegiatan industri dan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari keberlangsungan negara tersebut.

Saat ini, Indonesia telah mengeluarkan kebijakan energi yang salah satunya ditujukan untuk peningkatan keamanan pasokan energi dengan

memperhatikan aspek lingkungan dengan upaya konservasi sumber daya energi. (Blueprint Pengelolaan Energi Nasional 2006-2025, 2006: 12).

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 17 Tentang Energi menjelaskan bahwa pengelolaan energi adalah penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan energi serta penyediaan cadangan strategis dan konservasi daya energi. (UU No. 30 Tahun 2007). Kedua legalitas tersebut yang kemudian mendorong Indonesia untuk memberikan kesepakatan eksplorasi kepada perusahaan asing UNOCAL.

Indonesia, dalam menangani permasalahan perbatasan, akan tetap teguh mematuhi berbagai Hukum Internasional yang berlaku, termasuk UNCLOS Tahun 1982. Selain itu, diperlukan berbagai macam kebijakan yang mampu mengidentifikasi berbagai ancaman sehingga akan terdapat sebuah strategi keamanan wilayah Ambalat yang dapat berjalan efektif. Kebijakan yang mampu dan kuat memberikan penjelasan kepada pihak lain yang melakukan suatu ancaman kedaulatan wilayah, sehingga pihak lain menjadi yakin dan menyetujui. Walaupun secara internasional bahwa UNCLOS Tahun 1982 sudah diakui dan disetujui oleh pihak yang melakukan ancaman, yaitu Malaysia.

Upaya pengamanan yang dilakukan Indonesia akan menjadi gambaran analisis deskriptif dengan menekankan pada periode yang mampu membatasi analisis. Jika dilihat pada gambaran komprehensif isu, maka periode 2004 menjadi awal penelitian mengingat di periode ini Indonesia menjalin kesepakatan eksplorasi kepada perusahaan asing UNOCAL Amerika Serikat dan periode 2009 sebagai batasan penelitian mengingat periode ini merupakan puncak konflik.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka tulisan ini fokus untuk melakukan langkah analisis dengan menggunakan perspektif sekritisasi yang merupakan *process oriented* untuk digunakan sebagai

alat analisis dalam mengidentifikasi langkah pengamanan yang dilakukan Indonesia, terkait dengan persoalan Ambalat. Karena itu, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah :

- Bagaimana strategi keamanan energi Indonesia di Ambalat periode 2004-2009?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini tidak terlepas dari fokus permasalahan, yaitu:

- Untuk menganalisis upaya pengamanan sumber daya energi vital yang dilakukan terkait keamanan energi di Ambalat.
- Memberikan masukan kepada pengambil kebijakan untuk bertindak lebih komprehensif pada keamanan energi di Ambalat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dijabarkan menjadi dua kategori, sebagai berikut:

Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan sehingga penulis dapat memberikan rekomendasi suatu strategi pada keamanan energi Indonesia di wilayah Ambalat dan mengenai kekurangan strategi keamanan energi yang sudah ada.
2. Menjadi bahan pertimbangan dan rujukan bagi Pemerintah untuk melakukan upaya keamanan energi di wilayah perbatasan yang rawan akan konflik kepentingan bagi negara lain.

Manfaat Akademis

1. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi penelitian selanjutnya untuk terus melakukan penelitian dan kajian terhadap wilayah perbatasan yang memiliki kekayaan sumber energi dalam mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara.

2. Menjadi salah satu tinjauan pustaka atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian tentang keamanan energi terkait dengan wilayah perbatasan dan kedaulatan negara.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk lebih fokus dalam melakukan penelitian, dan atas keterbatasan peneliti sebagai masyarakat sipil, maka penelitian ini akan melakukan analisis mengenai:

- Peneliti melakukan analisis diskripsi terhadap upaya negara menjaga wilayah Ambalat secara politik, ekonomi, dan militer.
- Wilayah penelitian adalah wilayah Ambalat yang menjadi wilayah berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan penjelasan singkat dan keterkaitan antar BAB yang akan menjadi penulisan dalam penelitian ini, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

- **Bab I Pendahuluan**

Pendahuluan ini memuat konsep penulisan yang menjelaskan pentingnya kedaulatan negara pada wilayah perbatasan, terlebih dengan adanya sumber energi yang berpengaruh terhadap ekonomi negara.

- **Bab II Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi teori dasar atas konsep sekuritisasi/pengamanan sumber energi yang menjadi isu atas kedaulatan negara di Ambalat, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menjelaskan pentingnya mempertahankan kedaulatan negara. Sehingga menjadi dasar dari pemikiran, perhitungan dan analisis tesis.

- **Bab III Metodologi Penelitian**

Bab ini menyajikan perihal metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan paradigma kualitatif diskriptif yang menjelaskan dan memberikan gambaran secara utuh atas upaya yang dilakukan negara atas sekuritisasi/pengamanan yang dilakukan.

- **Bab IV Analisis dan Pembahasan**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai hasil analisis data-data kebijakan yang terkait dengan langkah sekuritisasi yang dilakukan Indonesia pada bidang politik, ekonomi, dan keamanan pada wilayah Ambalat.

- **Bab V Kesimpulan dan Saran**

Bab ini berisikan penarikan kesimpulan atas analisis data yang dilakukan dan diharapkan memberikan suatu rekomendasi dalam pembentukan strategi keamanan energi yang tepat dan komperhensif. Dengan melihat upaya sekuritisasi suatu wilayah perbatasan yang memiliki sumber daya alam yang dilakukan pada periode penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini merupakan bab yang mengaitkan antara model strategi sebagai dasar dalam menjalankan proses sekuritisasi terkait dengan keamanan energi. Logika teoritis yang digunakan dalam penelitian ini akan menjadi kerangka pemikiran yang bersumber pada berbagai literatur yang menjelaskan logika sekuritisasi di bidang keamanan energi.

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1. Konsep Strategi

Dokumen Strategi Pertahanan Negara menjelaskan bahwa pengembangan strategi terletak pada 3 substansi yang meliputi sasaran atau tujuan yang ingin dicapai (*ends*), sumber daya yang digunakan (*means*), dan cara mencapai tujuan (*ways*). (Strategi Pertahanan Negara, 2007: 10)

Dalam konteks serupa, strategi dapat dipahami sebagai upaya dalam membangun kekuatan atau keamanan. (David A. Lake, International Organization, Vol. 50, No.1, 1996: 1) Dalam membangun kekuatan atau keamanan, pemahaman mengenai strategi terletak pada 'all the resources of a nation, a band of nations, toward the attainment of the political objectives. (James Wirtz, NPS-IJWA-01-005: 3).

Terkait dengan itu, Indonesia memahami bahwa dalam setiap upayanya dalam menjaga keamanan dibutuhkan identifikasi terhadap strategi. Dalam buku putih pertahanan Indonesia 2008 menyatakan bahwa isu keamanan energi dalam dekade terakhir ini semakin mengemuka dan diperkirakan akan berdampak terhadap keamanan global dalam tahun-tahun yang akan datang. Kebutuhan masyarakat akan energi dapat dipastikan terus meningkat, sementara ketersediaannya semakin terbatas, berimplikasi secara politik, ekonomi, dan keamanan. (Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia 2008: 11-12)

2.1.2. Sekuritisasi

Upaya sekuritisasi merupakan bagian dari upaya negara dalam menjaga keamanan nasionalnya. Kondisi itu akan mempengaruhi sebuah negara dalam meningkatkan kekuatan nasionalnya, yang salah satunya bersumber pada keamanan energi sebuah negara.

Langkah sekuritisasi merupakan sebuah model strategi yang mengarah pada apa yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya.

Dalam konteks sekuritisasi, model strategi dalam melakukan sekuritisasi sumber daya alam yang ada, terletak pada upaya negara dalam memproteksi *referent object* (teritorial). Dengan melihat pada adanya ancaman dan menuntut negara untuk segera memobilisasi dengan pengerahan kebijakan politik yang menyangkut setidaknya 3 bidang, yaitu militer, ekonomi, dan politik.

Keamanan (*security*) adalah bentuk khusus dari politik. Semua masalah keamanan adalah masalah politik. Namun tidak semua konflik politik adalah masalah keamanan. Keamanan menjadi isu utama sengketa politik ketika aktor politik tertentu mengancam atau menggunakan kekuatan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari pihak lain sebagai bagian dari kepentingan nasional sebuah negara.

Perubahan agenda yang menempatkan *energy* sebagai bagian dari *security* terletak pada fungsi politik yang mengarahkan pada isu-isu tertentu yang menuntut mobilisasi negara dalam memproteksi. Konteks keamanan atau *security* merupakan kestabilan hubungan konflik atau ancaman yang dihadapi negara. Karena itu esensi *security* pada *energy* terletak pada upaya negara (*securitizing actor*) dalam memproteksi (*referent object*). (Buzan, 1998: 4).

Pada bidang militer, upaya menghadapi ancaman terletak pada penggunaan kekuatan militer (*survival of arms race*) untuk memproteksi

objek yang mendapatkan ancaman. Secara spesifik, keamanan pada bidang militer menekankan pada kemampuan negara dalam menjaga eksistensi negara dari ancaman dengan melibatkan kekuatan militer (Buzan, 1998: 50). Penggunaan kekuatan militer pada sektor militer menggambarkan adanya ancaman militer yang mempengaruhi keamanan nasional. Tidak seperti bidang atau sektor lainnya, sektor militer ancaman bidang militer bersifat langsung, sehingga kebijakan militer berperan signifikan dalam pengerahan kekuatan militer untuk menghadapi pola permusuhan (Buzan, 1998: 57-58)

Pada sektor politik, konteks keamanan terletak pada kedaulatan negara. Bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara yang bersifat pada ancaman non-militer namun dapat mengancam kedaulatan negara. Konteks ancaman non-militer terhadap kedaulatan negara memicu gangguan terhadap kestabilan organisasi, hal tersebut mendorong negara untuk melakukan sekuritisasi melalui pertahanan dalam keamanan berupa referensi level sistem, berupa masyarakat internasional dan hukum internasional. (Buzan, 1998: 141)

Instrumen politik merupakan salah satu pilar utama penopang negara disamping instrument lainnya seperti ekonomi, psikologis, teknologi, dan militer. Dalam upaya pertahanan negara, instrument politik merupakan bagian penting dari kekuatan pertahanan non-militer, yakni kekuatan nasional yang tidak bersenjata. Upaya politik sangat efektif dalam menyelesaikan berbagai bentuk konflik antarnegara. Instrument politik menghasilkan kekuatan diplomasi sebagai lini terdepan pertahanan negara. (Dephan, 2007: 59)

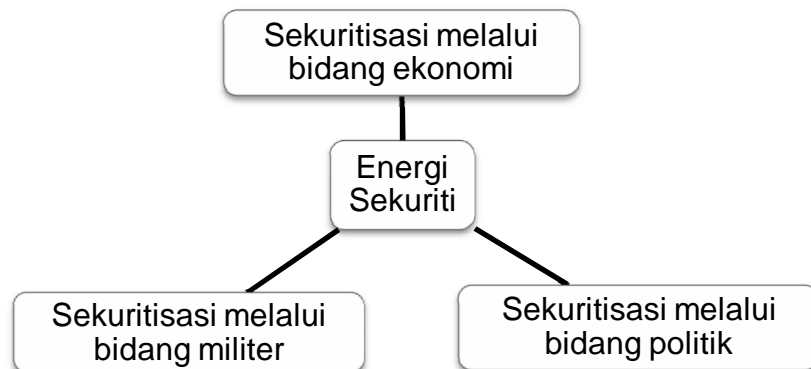
Hukum internasional menjadi acuan bagi negara untuk melakukan sekuritisasi melalui tindakan politik. Esensi politik terletak pada kemampuan institusional dan kestabilan otoritas dalam menegakkan atau mendorong aturan yang mengacu pada referensi level sistem, yaitu masyarakat internasional atau hukum internasional (Buzan, 1998: 145-148). Untuk itu, Indonesia mendukung salah satu produk hukum

internasional, yaitu UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi pada UU RI No.17 Tahun 1985 tentang pengesahan Unclos. Dengan produk hukum tersebut, Indonesia sebagai negara kepulauan, dapat menarik garis dasar/pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu, dengan ketentuan yang disebutkan dalam penjelasan atas UU No. 17 Tahun 1985 tentang pengesahan Unclos pada Bab I yang menyatakan bahwa : Dalam garis dasar/pangkal demikian termasuk pulau-pulau utama dan suatu daerah dimana perbandingan antara daerah perairan dan daerah daratan, termasuk atol, adalah antara satu berbanding satu (1:1) dan sembilan berbanding satu (9 : 1), yaitu:

1. Panjang garis dasar/pangkal demikian tidak boleh melebihi 100 mil laut, kecuali bahwa hingga 3 % dari jumlah seluruh garis dasar/pangkal yang mengelilingi setiap kepulauan dapat melebihi kepanjangan tersebut, hingga pada suatu kepanjangan maksimum 125 mil laut;
2. Penarikan garis dasar/pangkal demikian tidak boleh menyimpang dari konfigurasi umum Negara Kepulauan. Negara Kepulauan berkewajiban menetapkan garis-garis dasar/ pangkal kepulauan pada peta dengan skala yang cukup untuk menetapkan posisinya. Peta atau daftar koordinat geografi demikian harus diumumkan sebagaimana mestinya dan satu salinan dari setiap peta atau daftar demikian harus didepositkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pada sektor ekonomi, esensi *security* terletak pada faktor mobilitas ekonomi negara yang teragendakan pada bidang perdagangan, produksi dan keuangan. Pada bidang produksi, ketergantungan ekonomi negara menjadi tidak efisien ketika terjadi gangguan terhadap suplai dan produksi (sumber minyak) yang dieksploitasi untuk tujuan politik. Di sisi lain, pada ekonomi sektor juga terletak pada adanya bentuk persaingan komersil yang mendorong pada bentuk hubungan pertemanan atau permusuhan (Buzan, 1998: 97-98).

Adanya pola permusuhan dan pertemanan menggambarkan bahwa nilai atau keberadaan keamanan dan kaitannya dengan ekonomi menjadi sangat erat. Sangat tidak mungkin menjaga ekonomi jika tanpa membahas mengenai upaya dalam menjaga keamanan yang terkait dengan ekonomi.



Karena itu, ketiga sektor itu akan menjelaskan bagaimana upaya sekuritisasi yang dilakukan sebuah negara mengingat keamanan energi perlu dilakukan sekuritisasi dalam kerangka keamanan nasional yang menjadi bagian dari isu-isu non tradisional. Upaya sekuritisasi menjadi salah satu cara dalam mempertahankan objek penting (*referent object*) yang dalam hal ini akan dikaitkan dengan keamanan energi.

Ketiga sektor di atas menjelaskan bahwa adanya *referent objek* yang menjadi rentan karena adanya ancaman dari luar, pada akhirnya, mempengaruhi keamanan nasional sebuah negara, baik pada ancaman militer yang perlu disikapi dengan penggunaan kekuatan militer, dan gangguan politik yang sepatutnya juga dihadapi dengan mengacu pada aturan yang berlaku secara global dan internasional sehingga menjadi acuan bagi negara dalam menjalankan aturan yang berdasarkan hukum internasional, serta ancaman pada sektor ekonomi ketika terjadi upaya ancaman yang menghambat produksi negara sebagai kebutuhan yang terganggu sehingga berkonsekuensi pada ekonomi negara, yang perlu dihadapi melalui kekuatan militer.

2.1.3. Keamanan Energi

Era globalisasi mendorong terjadinya perluasan isu mengenai keamanan, salah satunya adalah keamanan energi atau *energy security*. Konteks *energy security* terletak pada pemahaman mengenai *energy* dan bidang *security*. Dalam beberapa literatur dijelaskan bahwa *energy security* merupakan kemampuan dalam *manage* kebutuhan energi, meningkatkan suplai energi domestik, atau meningkatkan keamanan terhadap ketersediaan energi domestik. (Deese, 1979: 140)

Keterkaitan antara isu energi dan keamanan terletak pada hubungan resiprokal atau timbal balik antara dinamika interaksi di dalam hubungan internasional antar negara dalam mencapai kesejahteraan dan kekuatan negara. Secara spesifik, isu energi mengaitkan erat antara kepentingan ekonomi dan politik negara. (Deese, 1979: 141)

Dalam interaksinya, energi, perubahan politik, dan perilaku konflik merupakan isu yang terkait dengan ekonomi, politik domestik dan keamanan nasional. Dampak energi yang berada pada kerangka keamanan nasional terletak pada keamanan energi yang sangat berpengaruh pada komoditas ekonomi sebuah negara. (Deese, 1979: 144)

Keterkaitan antara keamanan energi dengan keamanan nasional terletak pada keberadaan atau ketersediaan sumber energi dalam memenuhi kebutuhan energi (Elkind, 2007, www.brookings.edu).

Permasalahan keamanan energi sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu negara dapat mengelola sumber energinya yang semakin terbatas dalam penggunaan dan menjadi rentan kepada pemenuhan energi bagi generasi selanjutnya. Oleh karena itu, keamanan energi adalah komponen penting suatu bangsa dalam mempertahankan dan menstabilisasi sumber energinya. (Sovacool, 2011: 7) kondisi tersebut menjelaskan bahwa upaya pengelolaan sumber daya akan sangat mempengaruhi sebuah negara dalam menjaga keamanan nasionalnya

serta berupaya dalam menjaga eksistensinya di dalam interaksinya antar negara.

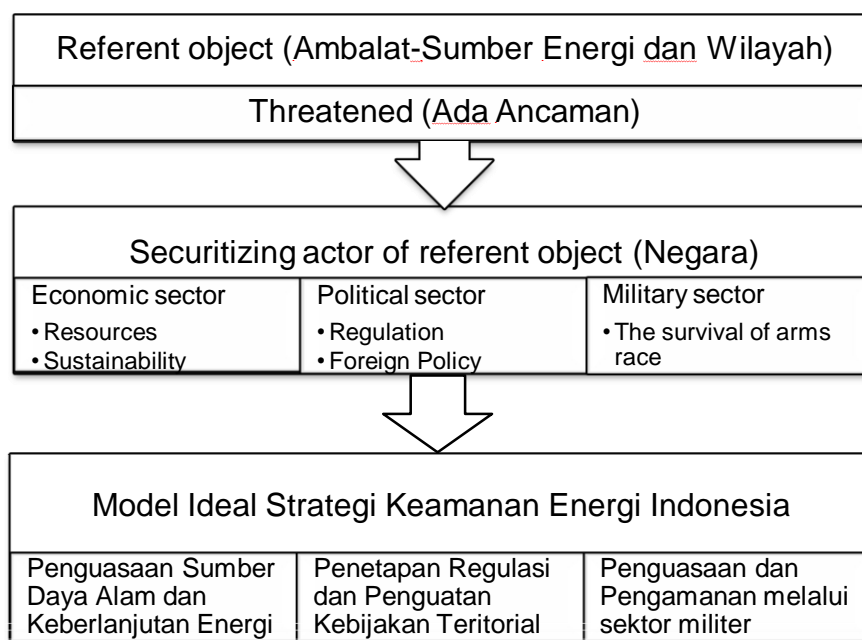
Keamanan energi dan penggunaan kekuatan militer kemudian menjadi bagian dari unsur kedaulatan, yang fokus pada ancaman keberadaan energi dari luar dan berkonsekuensi pada keamanan energi sebuah negara (Jewell, 2011).

2.2. Kerangka Pemikiran

Ambalat merupakan wilayah yang memiliki batas langsung dengan negara Malaysia dan mengandung kekayaan alam, seperti sumber minyak yang mendapatkan gangguan dalam upaya eksplorasi menghadapi Malaysia. Potensi ancaman yang ada bukan hanya kedaulatan saja, namun ancaman terhadap sumber daya energi yang memiliki peran penting dalam memenuhi keberlangsungan pasokan energi. Untuk itu Indonesia berupaya melakukan pengamanan melalui kebijakan keamanan energi yang mencakup tiga sektor, yaitu ekonomi, politik, dan militer.

Untuk dapat lebih memahami secara detail mengenai kerangka pemikiran ini, berikut sebagai gambaran model kerangka berpikir yang digunakan;

Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran



2.3. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis akan melihat beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai bagian dari tinjauan pustaka. Esensi atau fungsi dari memetakan beberapa hasil penelitian tersebut adalah untuk melihat perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang sedang dilakukan.

Beberapa hasil penelitian terdahulu adalah Jan Piet Hein Morin (2006), I Made Andi Arsana (<http://xa.yimg.com>) dan Indro Dwi Haryono (<http://indronet.files.com>). Tinjauan pustaka pertama menjelaskan mengenai klaim wilayah Ambalat yang dilakukan Malaysia secara sepihak, dengan melakukan pemetaan baru yang memasukan wilayah Ambalat menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Malaysia. Dan langsung memberikan aksi penguasaan secara militer kepada wilayah Ambalat, yang akhirnya menimbulkan suatu konflik militer di wilayah tersebut. Upaya yang dilakukan Malaysia tersebut menggambarkan bahwa terdapat kepentingan nasional yang ingin dicapai Malaysia, yaitu keberadaan sumber energi di Ambalat. Kondisi itu pada akhirnya menjelaskan bahwa nilai sebuah teritorial amat sangat penting sehingga setiap negara akan berupaya memiliki wilayah tersebut dengan melakukan berbagai manuver politik untuk mencapai tujuan nasionalnya.

Tinjauan pustaka kedua menjelaskan bahwa kedaulatan negara juga terletak pada zona maritim yang menjadi hak suatu negara pantai. Esensi kedaulatan terletak pada adanya pelanggaran wilayah yang dilakukan Indonesia atau Malaysia yang perlu dibuktikan secara spasial. Inti dari tulisan penelitian ini memberikan gambaran bahwa koordinat lintang utara dan bujur timur pada akhirnya menjadi perdebatan apakah Malaysia melakukan pelanggaran wilayah atau tidak.

Tinjauan pustaka ketiga menjelaskan bahwa Ambalat sebagai wilayah kedaulatan yang perlu dipertahankan dan analisis isu Ambalat terhadap perekonomian. Logika kedaulatan dan pengaruh isu Ambalat dalam perekonomian terletak pada dasar normatif Realisme yang

menekankan pada keamanan nasional sebuah negara. Negara dipandang sangat esensial bagi kehidupan warga negaranya. Fokus penelitian ini terletak pada unsur kedaulatan dan ekonomi yang dianalisis dalam kerangka kepentingan nasional.

Perbedaan tiga penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan dalam tesis ini terletak pada jika penelitian pertama dan ketiga fokus pada kedaulatan negara Indonesia dan menggambarkan adanya ancaman yang bersifat militer, serta penelitian kedua yang menekankan pada perekonomian negara terkait dengan keberadaan sumber daya alam, maka penelitian pada tesis ini, secara berbeda, berupaya untuk memberikan gambaran deskriptif mengenai strategi Indonesia melalui kebijakan dalam tiga bidang, yaitu ekonomi, politik, dan militer, dalam kerangka sekuritisasi.

Esensi tiga bidang tersebut terletak pada bidang ekonomi yang menekankan pada nilai strategis sumber energi yang ada pada wilayah Ambalat, yang dianggap secara sepihak oleh Malaysia adalah wilayah kedaulatannya, karena pada wilayah ini memang terdapat sumber energi yang cukup besar dalam memberikan pasokan energinya secara berkelanjutan. Tiga bidang tersebut akan digambarkan melalui upaya Indonesia dalam melakukan eksplorasi dengan bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu, dan bidang politik yang berlandaskan pada hukum internasional, dan bidang militer melalui upaya pengamanan yang dilakukan angkatan laut Indonesia.

Sebagai ringkasan dari garis-garis besar mengenai penelitian terdahulu, berikut dapat dilihat pada bagan sebagai berikut;

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Jan Piet Hein Morin (2006)	<i>Klaim Sepihak Ambalat oleh Malaysia dan Implikasinya bagi Hubungan Indonesia – Malaysia (2005).</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pentingnya wilayah teritorial bagi sebuah negara. • Upaya politik dilakukan untuk mencapai tujuan.

2	Indro Dwi Haryono (2007)	<i>Perspektif Malaysia tentang Sengketa Ambalat.</i>	<ul style="list-style-type: none">• Pelanggaran wilayah Ambalat terkait dengan sumber energi yang memiliki nilai ekonomi bagi negara.
3	I Made Andi Arsana (2009)	<i>Ambalat: Ketika Nasionalisme Diuji</i>	<ul style="list-style-type: none">• Adanya pelanggaran wilayah kedaulatan

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Buzan, Barry. (1998). *Security: a New Framework for Analysis*. London: Lynn Rienner Publisher
- Adhi Dharma Permana, Outlook Energi Indonesia 2012, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta: 2012
- Cherp A, Jewell J. (2011). *The three perspectives on energy security: intellectual history, disciplinary roots and the potential for integration*. Hungary: Sciencedirect
- Deese, David A. (Winter, 1979-1980). *Energy: Economics, Politics, and Security, International Security*. Vol. 4
- Dwi Haryono, Indro, Perspektif Malaysia Tentang Sengketa Ambalat, 2006
- Grygiel, Jacob, *Great Power and Political Change, USA: the John Hopkins University Press*, 2006
- Hasibuan, Rosmi. Tinjauan Yuridis Konflik Indonesia Malaysia Tentang Kepemilikan Hak Berdaulat Atas Blok Ambalat dan Ambalat Timur, Jurnal Equality, Vol. 10, No. 2, Agustus 2005
- Isi Deklarasi Djuanda, Dokumen Kementerian Luar Negeri Indonesia, dalam Yuli Fachri, Politik Luar Negeri Malaysia setelah Keputusan Mahkamah Internasional Tahun 2002 tentang Sipadan-Ligitan, Jurnal Transnasional, Vol. 4, No. 2, Februari 2013
- Jan Piet Hein Morin. (2006). *Klaim Sepihak Ambalat oleh Malaysia dan Implikasinya bagi Hubungan Indonesia – Malaysia (2005)*. Depok: Universitas Indonesia
- Kountur, Ronny. (2007). *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum Laut Internasional*, Bandung: Binacipta, 1986.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Morgenthau, Hans. (1985). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, New York: Alfred Knof

Tumiran, Perspektif Tentang Energi Nasional Saat Ini dan Kedepan,
Dialog Energi Dewan Energi Nasional, Jakarta 24 Oktober 2012

Kebijakan:

Blueprint Pengelolaan Energi Nasional 2006-2025, Jakarta 2006

Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008

DEPHAN. (2008). Buku Putih Pertahanan Indonesia. Departemen
Pertahanan Republik Indonesia

DEPHAN. (2007). Buku Strategi Pertahanan Negara. Departemen
Pertahanan Republik Indonesia

Laporan Kunjungan Delegasi Komisi I DPR RI ke Negara Malaysia tanggal
9-12 Juni 2009

Laporan Kunjungan Kerja Komisi I DPR dalam Reses masa
persidangan III tahun sidang 2004 – 2005 ke Profinsi Kalimantan
Timur, tanggal 4 s/d 8 april 2005

Laporan Penyelidikan Geologi dan Geofisika Kelautan Perairan Sebatik,
Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, Pusat Penelitian
dan Pengembangan Geologi Kelautan, Departemen Energi dan
Sumberdaya Mineral, 2004

Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian Peranan Dan Fungsi
Dalam Era Dinamika Global*, Jakarta: Alumni, 2003.

Republik Indonesia, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Semangat
Baru Mengubah Wajah Perbatasan Negara: Refleksi dan Proyeksi,
2011

Tumiran, Perspektif Tentang Energi Nasional Saat Ini dan Kedepan,
Dialog Energi Dewan Energi Nasional, Jakarta 24 Oktober 2012

Subagyo, Joko. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

The military balance, IISS, 2006-2010

Sovacool, Benjamin K. (2011). *The Routledge Handbook of Energy
Security*. USA: Routledge Taylor and Francis Group

Williams, Paul D. (2008). *Security Studies: an Introduction*. USA:
Routledge Taylor and Francis Group

Wulandari B. Tjandra, *Sengketa Wilayah Perbatasan Perairan Ambalat–Karang Unarang Pasca Kasus Sipadan dan Ligitan*, Tinjauan Hukum Laut Internasional

Internet:

Amarullah, Amril. Inilah Isi Perut Ambalat, diunduh melalui http://nasional.news.viva.co.id/news/read/64883-apa_sebenarnya_yang_tertanam_di_ambalat

Arsana, I M. A. (2009). *Ambalat: Ketika Nasionalisme Diuji*. <http://xa.yimg.com>. Diakses tanggal 14 Mei 2013

Cadangan Minyak dan Gas Ambalat Sangat Besar, diunduh melalui <http://www.tempo.co/read/news/2009/06/02/090179337/Cadangan-Minyak-dan-Gas-Ambalat-Sangat-Besar>

Chevron, Indonesia Fact Sheet, 2012, hal. 1, diakses melalui <http://www.chevron.com/documents/pdfcorporatefactsheet.pdf>, pada tanggal 18 Oktober 2013

Dwi Puspitasari S, Dewi. Eidman, Ety, Adrianto, Luky, Studi Analisis Konflik Ambalat Di Perairan Laut Sulawesi, diunduh melalui, <http://medpet.journal.ipb.ac.id/index.php/bulekokan/article/viewFile/2711/1695>

Elkind, Jonathan. (2007). *Building A Secure Energy Future: A Challenge For A New Presidential Leadership*. <http://www.brookings.edu>. Diakses tanggal 13 Mei 2013

Haryono, Indro D. (2007). *Perspektif Malaysia tentang Sengketa Ambalat*. <http://indronet.files.com>. Diakses tanggal 14 Mei 2013

Hikmahanto Juwana, Isu Pokok Ambalat, Koran Kompas, Jumat, 05 Juni 2009

Indonesia Kirim 36 Protes soal Ambalat, diunduh melalui <http://internasional.kompas.com/read/2009/06/05/13310731/Indonesia.Kirim.36.Protes.soal.Ambalat>, Jumat, 5 Juni 2009

Infiltrasi Asing Kembali Ancam Blok Ambalat, diunduh melalui <http://metrotvnews.com/index.php/metromain/news/2010/05/01/16724/Infiltrasi-Asing-Kembali-Ancam-Blok-Ambalat>

Isnu, Letak geografis Indonesia sebagai Bagian Terpenting Oleh Negara-Negara berbagai Kawasan, diunduh melalui, <http://koranbogor.com/2012/11/05/isnu-letak-geografis-Indonesia-sebagai-bagian-terpenting-dari-negara-negara-berbagai-kawasan/>

Kemhan. (2012). *Masalah Ambalat: Pembentukan Provinsi Kaltra Sangat Mendesak*. <http://kemhan.go.id>. Diakses tanggal 22 September 2012

Kompas, Presiden: Hentikan Provokasi Malaysia, Minggu 7 Juni 2009

Menlu: Perundingan Ambalat Capai Kemajuan, diunduh melalui <http://www.antaraneews.com/berita/152210/menlu-perundingan-ambalat-capai-kemajuan>, pada 25 Agustus 2009

Presiden SBY: Ambalat Milik RI, diunduh melalui <http://news.liputan6.com/read/232054/presiden-sby-ambalat-milik-ri>, pada 3 Juni 2009

Reformasi Pertahanan dan Kapabilitas Pertahanan Negara yang Murah Meriah, diunduh melalui <http://www.kemhan.go.id/kemhan/?pg=31&id=150>

Sengketa Ambalat: isi perut ambalat, diunduh melalui http://sorot.news.viva.co.id/news/read/66215-isi_perut_ambalat

Tugas pokok TNI Angkatan Laut, diunduh melalui <http://www.tnial.mil.id/Aboutus/TugasTNIAL.aspx>